

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesulitan ekonomi di Indonesia tidak hanya terjadi saat krisis 1998, kesulitan ekonomi sudah muncul sejak era Orde Lama. Layaknya perumpamaan *Nodweer Exces* dalam disiplin ilmu hukum; kapal yang karam dan hanya tersisah satu batang kayu untuk berpegangan, seseorang harus melakukan apapun demi menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun harus mengorbankan nyawa orang lain. Indonesia dalam hal ini, harus rela melakukan apapun biayanya untuk mengeluarkan dirinya dari kesulitan ekonomi serta mempertahankan stabilitas politik. Pada 1967, Indonesia menyepakati Kontrak Karya I dengan Freeport Sulphure Company (Anak perusahaan dari Freeport McMoran yang kemudian menjadi PT Freeport Indonesia). Hal ini tentu saja merugikan negara dikarenakan posisi Pemerintah Indonesia yang menjadi sejajar dengan PT Freeport Indonesia.¹

Modal asing yang ditanamkan oleh Freeport Sulphure Company di Indonesia seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi² terutama di daerah Papua. Freeport McMoRan merupakan perusahaan pertambangan emas dan tembaga yang berasal dari Amerika Serikat. Freeport McMoRan memproduksi

¹ Ferdy Hasiman. *Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019).

² Graham Bannock, Ron E. Baxter, and Evan Davis. *Dictionary Of Economics*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1972.

emas tahunan sebanyak 94% dari tambang Grasberg, Papua. Selain Papua, Freeport McMoRan memproduksi pasokan emasnya di Amerika Utara dan Selatan yang hanya menyentuh angka 6%.³

Angka luar biasa yang dimiliki PT Freeport Indonesia memang membanggakan, tetapi sekaligus mencoreng nama Pemerintahan Indonesia mengingat PT Freeport Indonesia menandatangani Kontrak Karya I saat negara sedang kacau seperti kutipan George A. Mealey (Komisaris PT Freeport Indonesia)

Pada waktu pertama kali kami datang ke Jakarta, pada awal Juni 1966, keadaan serba tidak menentu. Soeharto baru saja mengambil alih kekuasaan. Kami harus bersaing untuk mendapatkan Ertsberg, prasarana kacau balau, hanya ada satu hotel di Jakarta, ekonomi berantakan, landasan hukum untuk membuat perjanjian serba tidak jelas, dan nasib Irian Jaya harus ditentukan oleh referendum penentuan nasib sendiri. Kamilah salah satunya yang bersedia mengambil resiko dengan pemerintah yang serba baru ini. Semua itu terasa wajar-wajar saja, tetapi pada saat itu, beberapa orang menganggap hal itu tindakan nekat.⁴

Masuknya Freeport McMoran ke Indonesia memiliki sejarah pahit tersendiri bagi masyarakat setempat. Wilayah tempat PT Freeport Indonesia beroperasi merupakan wilayah adat Amungme yang memiliki sebuah mitologi, yaitu orang Amungme percaya bahwa sukunya adalah keturunan pertama dari anak sulung bangsa di Indonesia memiliki seorang ibu. Seorang ibu yang kemudian meninggal, berubah menjadi tanah yang sangat luas, yaitu Amungsal. Tanpa disadari, daerah Amungsal ini memiliki kekayaan sangat mendalam, yang

³ Ferdy Hasiman. Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019).

⁴ Ibid.

kemudian dijadikan daerah konsesi kepada PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.⁵

Sulit untuk tidak setuju terhadap pendapat, “banyak yang mencintai tanah Papua, tetapi tidak banyak yang mencintai orang-orang Papua.”⁶ Pernyataan bisa ditujukan terhadap pemerintah yang sudah tahu bahwa tindakan mereka berlawanan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menghubungkan dengan hak ulayat masyarakat Papua yang tidak diperjuangkan sesuai dengan pendirian negara. Hak ulayat sendiri merupakan sebuah hak adat yang di dalamnya terdiri atas sumber daya untuk diolah dan dimanfaatkan oleh adat setempat.⁷ Operasional yang dilakukan PT Freeport Indonesia merupakan kesepakatan sepihak dengan Pemerintah Indonesia, sehingga mengacu terhadap UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 untuk memperhatikan juga kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Amungme. Sehingga banyak langkah yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Pemerintah Pusat sadar, dan mereka mengetahui kepentingan untuk mengganti Kontrak Karya yang bersifat merugikan. Pemerintah mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam UU No 4/2009. IUPK yang muncul menyebabkan saham kepemilikan PT Freeport Indonesia turun menjadi 49% dari 91%, sehingga memberikan 51,2% wewenang saham bagi

⁵ Eltinus Omaleng. Papua Minta Saham. (Bekasi: Kandil Semesta, 2016). Hal. 13.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸ Kepemilikan saham 51,2% bagi Indonesia sudah disepakati untuk diberikan sebesar 10% bagi Pemerintah Daerah Papua (5% milik Provinsi Papua, dan 5% milik Kabupaten Mimika tempat Freeport beroperasi) melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses perpindahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia tidaklah mudah, perpindahan saham yang ditangani oleh Kementerian Keuangan ini menghadapi adanya perbedaan kepemilikan saham awal yang menyebabkan harga saham berbeda-beda. Upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan saham tersebut merupakan kesadaran untuk memberikan rasa hormat akan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua. Konflik yang dialami oleh masyarakat Papua dengan Pemerintah Indonesia terdampak dengan kehadiran PT Freeport Indonesia, sementara PT Freeport Indonesia memiliki aktifitas pertambangan yang di dalamnya berdampak pada konflik Papua memiliki beberapa upaya untuk meredakan konflik Papua yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan riset yang telah dilakukan penulis, mengenai dampak beroperasinya PT Freeport Indonesia bagi masyarakat Papua. Penulis menemukan adanya kejanggalan dalam operasi ini. Proses penambangan oleh PT Freeport Indonesia yang seharusnya memajukan bangsa, memiliki dampak terhadap konflik

⁸ Ferdy Hasiman. Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019).

Papua. Keputusan kerja sama yang terpaksa dilakukan Indonesia dengan PT Freeport Indonesia memang sudah salah perhitungan sedari awal, dan sulit untuk menyembuhkannya. Pemerintah Indonesia berusaha untuk segera mengganti Kontrak Karya menjadi kontrak yang lebih menguntungkan, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus hingga melakukan divestasi saham guna menguntungkan negara dan juga harapannya dapat memberikan lebih terhadap masyarakat Papua apa yang menjadi haknya. Proses dari awal beroperasinya PT Freeport Indonesia sampai sekarang, termasuk di dalamnya terdapat proses konversi kontrak, memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat Papua serta konflik di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu:

1. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami masyarakat Papua setelah PT Freeport Indonesia beroperasi?
2. Bagaimana keberadaan PT Freeport Indonesia berdampak terhadap konflik Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan agar memberikan gambaran sebagai destinasi akhir penulisan penelitian. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi dampak yang diberikan PT Freeport Indonesia bagi kehidupan masyarakat Papua. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih perubahan yang dialami masyarakat Papua setelah

beroperasinya PT Freeport Indonesia. Tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi dampak dari beroperasinya PT Freeport Indonesia terhadap konflik Papua. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui tindakan dan apa saja yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia sehingga berdampak pada konflik Papua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kegunaan bagi pembaca. Kegunaan pertama adalah untuk meningkatkan wawasan pembaca mengenai beroperasinya PT Freeport Indonesia dan dampaknya bagi konflik Papua. Berikutnya adalah untuk membuka pemikiran pembaca mengenai beroperasinya PT Freeport Indonesia yang memberikan dampak bagi konflik Papua. Sehingga masyarakat Papua dan Pemerintah memberikan tanggapan dan reaksi secara proporsional terhadap operasional PT Freeport Indonesia. Kegunaan terakhir adalah berguna sebagai sebuah referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian lain yang memiliki topik dampak PT Freeport Indonesia terhadap konflik Papua.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan melingkupi lima bagian/bab dari skripsi yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masuknya Freeport ke Indonesia, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan keadaan di Indonesia saat itu yang memudahkan proses beroperasinya PT Freeport Indonesia. Bab ini juga menjelaskan bagaimana PT Freeport Indonesia mulai memiliki dampak pada konflik Papua. Setelah itu, pada bab ini juga terdapat rumusan masalah sebagai acuan dari penelitian dan berikutnya terdapat tujuan dan kegunaan penelitian untuk memberi tahu maksud dan arah dari penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang menjelaskan kerangka dari penelitian.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bab berikutnya akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan kajian-kajian karya tulis mengenai PT Freeport Indonesia dan dampaknya bagi konflik Papua. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori dan konsep yang berguna sebagai dasar penulis untuk melakukan analisis pada bab IV.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membantu penulis menentukan jalur dan arah dalam menulis penelitian berdasarkan metode yang sudah dipilih. Penulis memilih pendekatan, metode, teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang cocok bagi penulis.

BAB IV ANALISIS

Penulis melakukan analisis terhadap Dampak Beroperasinya PT Freeport Indonesia bagi konflik Papua. Analisis dilakukan berdasarkan dasar teori dan konsep yang telah dipilih, kemudian dilakukan searah dengan jalur metode penelitian yang juga telah dipilih. Analisis yang dilakukan juga memiliki dasar data yang telah diambil melalui buku daring maupun laring, *website* berita dan pemerintah, jurnal baik daring maupun laring, serta wawancara.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibentuk pada bab pertama, yaitu dampak PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Papua. Berikutnya dampak PT Freeport Indonesia terhadap konflik Papua yang tidak hanya melanggar HAM bagi masyarakat, tetapi juga terdapat pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat dampak positif dan negatif. Serta saran yang diberikan oleh penulis berupa saran konteks dan konsep penulisan yang penulis temukan selama melakukan analisis tugas akhir.